



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUHARTI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **230482**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.441.988.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/47 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 888.984.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.436.004.000		
3. Tanah Seluas 26950 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 127.500.000		
5. Tanah Seluas 2930 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
6. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
7. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.554.500.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>72.470.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAP</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.061.500.400</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>818.078.774</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.394.037.174</b>



III. HUTANG

Rp. 1.001.026.307

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.393.010.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.